

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 dapat tersusun sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta dengan tekad dan semangat sebagai salah satu instrumen dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 ini berisi informasi tentang Perencanaan dan Capaian Kinerja Tahun Ketiga dalam masa RPJMD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyaknya kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Akhir kata tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2019 ini.

Rengat, 01 Februari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

  
H. ARIEF FADILLAH SE, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650713 199402 1 001

## DAFTAR – ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A LATAR BELAKANG.....	1
B GAMBARAN SINGKAT.....	2
C STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH.....	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	9
II. 1. VISI DAN MISI.....	9
II. 2. TUJUAN DAN SASARAN.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
III. 1 INDIKATOR KINERJA.....	16
III. 2 CAPAIAN KINERJA.....	16
III. 3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	22
III. 4 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....	35
BAB IV PENUTUP.....	36

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggung jawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat disebut sebagai instrumen pertanggungjawaban, yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan stratejik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

## B. GAMBARAN SINGKAT

### 1. KEDUDUKAN ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sebagai unsur pelaksana otonomi di bidang pendapatan daerah, maka berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1) Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan, Bidang Penerimaan, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, Bidang Pengembangan dan Evaluasi serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2) Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah mencakup rencana strategi dan program sesuai dengan RPJMD;
2. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penerimaan pendapatan daerah;
3. Penyelenggaraan rencana strategis dan program kerja Badan;
4. Penetapan kebijakan pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI

### 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2018, antara lain:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
- 4) Bidang Penerimaan;
- 5) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan;
- 6) Bidang Pengembangan dan Evaluasi;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dari struktur organisasi tersebut diatas dapat diuraikan lebih lanjut: Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang menyelenggarakan urusan umum, penyusunan program dan keuangan Badan, yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pendapatan Daerah di bidang administrasi penerimaan daerah, yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan.

Bidang Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang administrasi penerimaan daerah, yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer;
- b. Sub Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB;
- c. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Lainnya.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penagihan, pendataan dan pengelolaan pendapatan lain-lain yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Keberatan dan Banding;
- c. Sub Bidang Pemeriksaan.

Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan pengendalian yang terdiri dari:

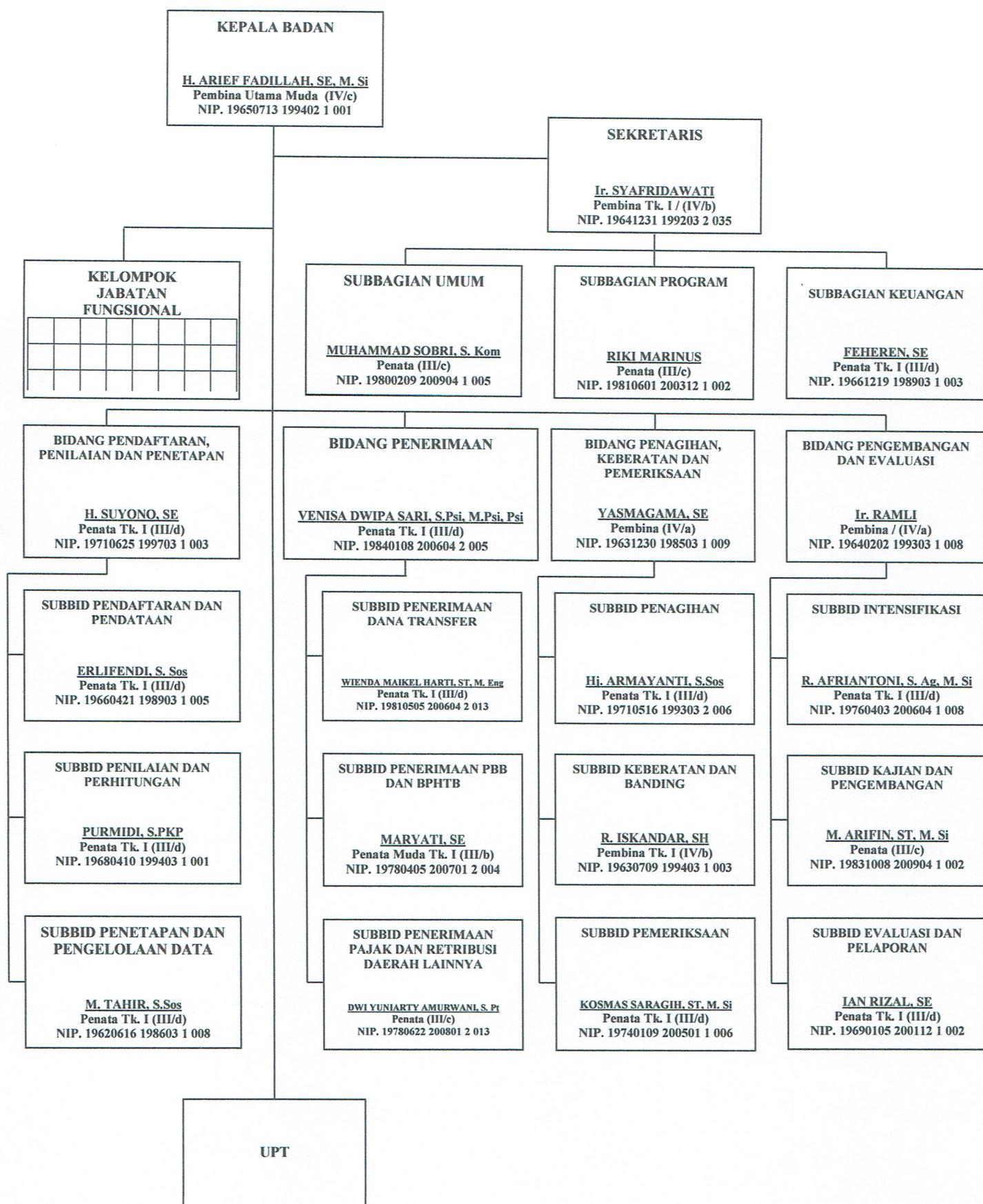
- a. Sub Bidang Intensifikasi;
- b. Sub Bidang Kajian dan Pengembangan;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana teknis yang membantu kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis operasional Badan Pendapatan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Tata Usaha (KTU).

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. INHU

## LAMPIRAN XI

: BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 121 orang yang terdiri dari:

- Jumlah PNS : 66 Orang
- Jumlah CPNS : - Orang
- Jumlah Pegawai Honor : 55 Orang

Dari 66 Orang yang berstatus CPNS dan PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Pendidikan, terdiri dari:

- S3 : - Orang
- S2 : 7 Orang
- S1 : 46 Orang
- D1 s/d D3 : 1 Orang
- SLTA : 12 Orang
- SLTP : - Orang
- SD : - Orang

Dari 66 orang yang berstatus CPNS dan PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Jabatan, terdiri dari:

- Eselon I : - Orang
- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 28 Orang
- Staf : 32 Orang
- Fungsional : - Orang

Dan jika dirinci berdasarkan Golongan, terdiri dari:

- Golongan IV : 5 Orang
- Golongan III : 52 Orang
- Golongan II : 9 Orang
- Golongan I : - Orang

## D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai

seberapa jauh Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Dengan mengetahui pengaruh internal dan eksternal organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan meliputi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi, adalah:

## 1. Faktor Internal

### 1) *Kekuatan (Strength)*

- a. Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah.
- c. Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.

### 2) *Kelemahan (Weakness)*

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku;
- c. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya pemungutan dan penggalian potensi penerimaan daerah.

## 2. Faktor Eksternal

### 1) *Peluang*

- a. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga mengakibatkan tingginya mobilitas orang dan barang.
- b. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.
- c. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.

### 2) *Ancaman*

- a. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
- c. Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi Dana Perimbangan.

Dari uraian diatas maka dirumuskan faktor-faktor penghambat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

- 1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 2. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah;
- 3. Terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4. Belum optimalnya penerapan secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS

#### II.1 VISI DAN MISI

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah mencanangkan visi organisasi untuk eksistensinya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Visi organisasinya, yakni:

**“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN AUDITABEL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”**

- **Penjelasan Makna Visi**

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pernyataan bahwa Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hulu yang semakin meningkat dan bersama sumber-sumber pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah menjamin pembiayaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan.
2. Pernyataan transparan dan akuntabel, berarti bahwa sistem dan prosedur penerimaan daerah harus bersifat terbuka sebagai bagian dari informasi publik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

- **Pernyataan Misi**

Di samping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Mewujudkan Sistem dan Prosedur Administrasi Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel;
2. Membangun Aparatur Bapenda yang Profesional;
3. Membangun Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah.

- **Penjelasan Makna Misi**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, tertib, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang taat pajak dan retribusi daerah, serta memperjuangkan optimalisasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah.

## II.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat menjadi ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sejalan dengan misi yang telah ditetapkan antara lain:

<b>Misi ke satu</b>	Mewujudkan Sistem dan Prosedur Administrasi Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai ketentuan perundangan berlaku.</li><li>2. Penerapan pengelolaan Penerimaan Daerah yang transparan dan akuntabel.</li></ol>
Sasaran	: Terwujudnya Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
<b>Misi ke dua</b>	: Membangun Aparatur Bapenda yang Profesional.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Pelayanan Prima Badan Pendapatan Daerah.</li><li>2. Pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan Penerimaan Daerah.</li></ol>
Sasaran	: Terwujudnya Aparatur Bapenda yang Profesional.
<b>Misi ke tiga</b>	: Membangun Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah.
Tujuan	: Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi.
Sasaran	: Terwujudnya Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah.

## II.3 Strategi dan Kebijakan

### II.3.1 Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Optimalkan sumber daya aparatur dengan payung hukum yang ada untuk menggali potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Tingkatkan kemampuan aparatur dalam menggali potensi PAD;
3. Penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.

### II.3.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Profesionalisme aparatur Penerimaan Daerah;
2. Pelaksanaan pelayanan prima bagi Wajib Pajak dan Retribusi;
3. Pelaksanaan Transparansi Penerimaan Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Pendapatan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
6. Mengembangkan komputerisasi manajemen di bidang Pendapatan dengan berbasis teknologi informasi;
7. Mengembangkan efisiensi dan efektifitas kerja Penerimaan Daerah;
8. Pelaksanaan sumber baru Pendapatan Asli Daerah dari komponen Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011;
9. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah dari komponen Pajak Daerah yang sudah dipungut sebelumnya dan diubah pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
10. Akurasi dan optimalisasi pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

### II.3.3 Program

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan

program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk Tahun 2019 Program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **II.3.4 Kegiatan**

Agar tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan 6 (enam) program tersebut di atas, maka ditetapkan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
  4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
  12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
  13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
  14. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
  1. Pembangunan Gedung Kantor;
  2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
  1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur:
  1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah:
  1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
  2. Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan;
  3. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  4. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  5. Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
  6. Akurasi Pendataan dan Pendaftaran WP/WR;
  7. Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
  10. Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  11. Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  12. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah;
  13. Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
  14. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah.

#### **II.3.5 Penetapan Kinerja Tahun 2019**

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu antara lain: Tabel Formulir Penetapan Kinerja

**TABEL II.3.5**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

No	Program Utama OPD Tahun 2019		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Realisasi target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%
2	Terpenuhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah	100%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	80%

**Penjelasan**

**Jumlah Anggaran**

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 2,976,520,419.00
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rp. 147,771,600.00
- Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan	Rp. 124,491,759.00
- Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah	Rp. 231,975,900.00
- Sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah bagi WP/WR	Rp. 156,684,200.00
- Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Indragiri Hulu	Rp. 597,591,800.00
- Akurasi pendataan Wajib Pajak/Wajib Retribusi	Rp. 296,885,850.00
- Koordinasi, Konsultasi & Sinkronisasi Data Penerimaan Dana BHP/Bukan Pajak	Rp. 301,963,600.00
- Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 406,897,000.00
- Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 201,620,200.00
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Rp. 217,716,040.00
- Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 150,187,700.00
- Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Rp. 142,734,770.00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan perwujudan dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pengukuran ini mencakup 2 (dua) hal, yaitu penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan visi dan Misi selama tahun 2018.

#### **III.1 INDIKATOR KINERJA**

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome* kecuali atas kegiatan yang sulit Pengukuran *Outcomenya* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang tersedia. Indikator Kinerja *Input* yang digunakan pada umumnya adalah dana dengan satuan Rupiah dan Indikator Kinerja *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan dicapai dari suatu kegiatan sedangkan Indikator Kinerja *Outcome* sesuai dengan hasil yang diharapkan dari *Output* tersebut. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian Indikator Kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*Performance Plan*) dengan realisasi kinerja (*Performance Result*).

#### **III.2 CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018. Evaluasi kinerja merupakan suatu aktivitas/kegiatan untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara kuantitatif dalam bentuk angka. Evaluasi berguna sebagai umpan balik atas kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan guna mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan (PS-1 RENSTRA).

Evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan Skala Pengukuran Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	100,49%	100,49%
2.	Terpenuhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	132,06%	132,06%
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	80%	80,77%	100,96%

#### Penjelasan masing-masing sasaran

##### 1. Sasaran 1 : Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	100,49%	100,49%

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah
3. Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Indragiri Hulu
4. Akurasi Pendataan Wajib Pajak/Retribusi Daerah
5. Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
6. Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Adapun target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.483.349.248.186,02 terealisasi sebesar Rp.1.490.550.934.347,50 atau sebesar 100,49%.

#### Faktor pendukung :

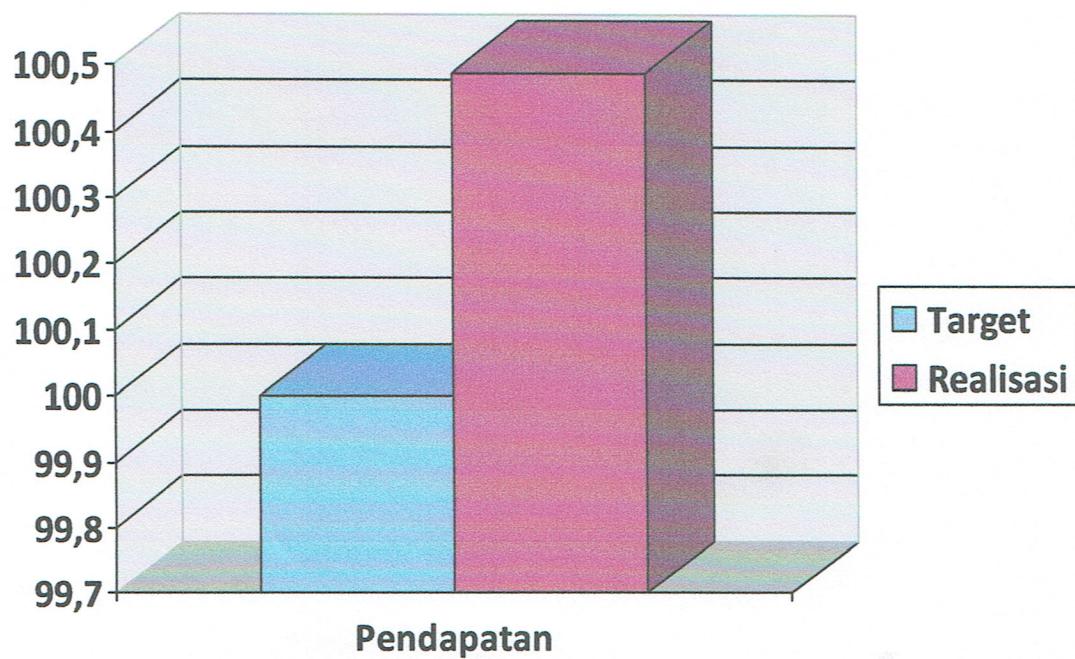
1. Adanya regulasi yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Adanya komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah
3. Tersedianya Sistem Administrasi Pengelolaan Pajak yang Berbasis Teknologi Informasi
4. Telah Berjalannya Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai secara Online dengan Bank Persepsi

#### Permasalahan dan Faktor Penghambat :

1. Belum Maksimalnya Pemungutan Retribusi Daerah
2. Belum diterbentuknya Petugas Juru Sita
3. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pajak Daerah

#### Solusi Pemecahan Masalah :

1. Adanya Anggaran yang Memadai dalam Pelaksanaan Kegiatan Pada Badan Pendapatan daerah
2. Rekrutmen Aparatur yang memiliki Pendidikan yang memadai, Jujur dan Loyalitas terhadap Pekerjanaan
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang, Kegiatan dalam upaya peningkatan PAD



## 2.Sasaran 2 : Terpenuhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	132,06%	132,06%

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Indragiri Hulu
3. Akurasi Pendataan Wajib Pajak/Retribusi Daerah
4. Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Faktor pendukung :

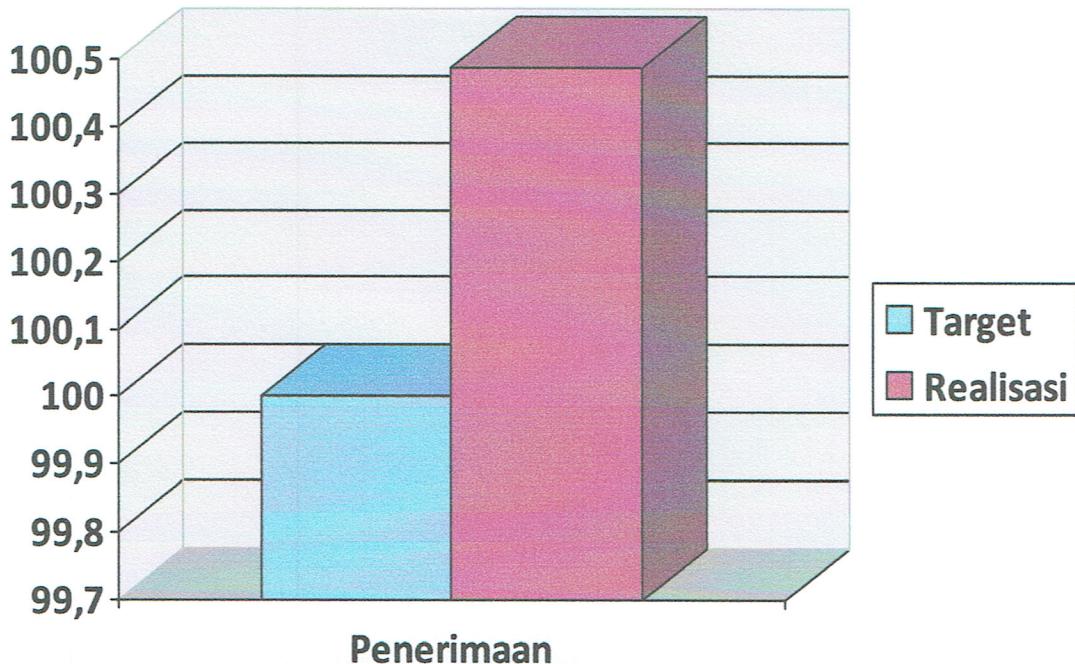
1. Adanya regulasi yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Adanya komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah
3. Tersedianya Sistem Administrasi Pengelolaan Pajak yang Berbasis Teknologi Informasi
4. Telah Berjalannya Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai secara Online dengan Bank Persepsi

Permasalahan dan Faktor Penghambat :

1. Belum Maksimalnya Pemungutan Retribusi Daerah
2. Belum diterbentuknya Petugas Juru Sita
3. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pajak Daerah

Solusi Pemecahan Masalah :

1. Adanya Anggaran yang Memadai dalam Pelaksanaan Kegiatan Pada Badan Pendapatan daerah
4. Rekrutmen Aparatur yang memiliki Pendidikan yang memadai, Jujur dan Loyalitas terhadap Pekerjanaan
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang, Kegiatan dalam upaya peningkatan PAD



**Sasaran 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	80%	80,77%	100,96%

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan :

1. Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Faktor pendukung :

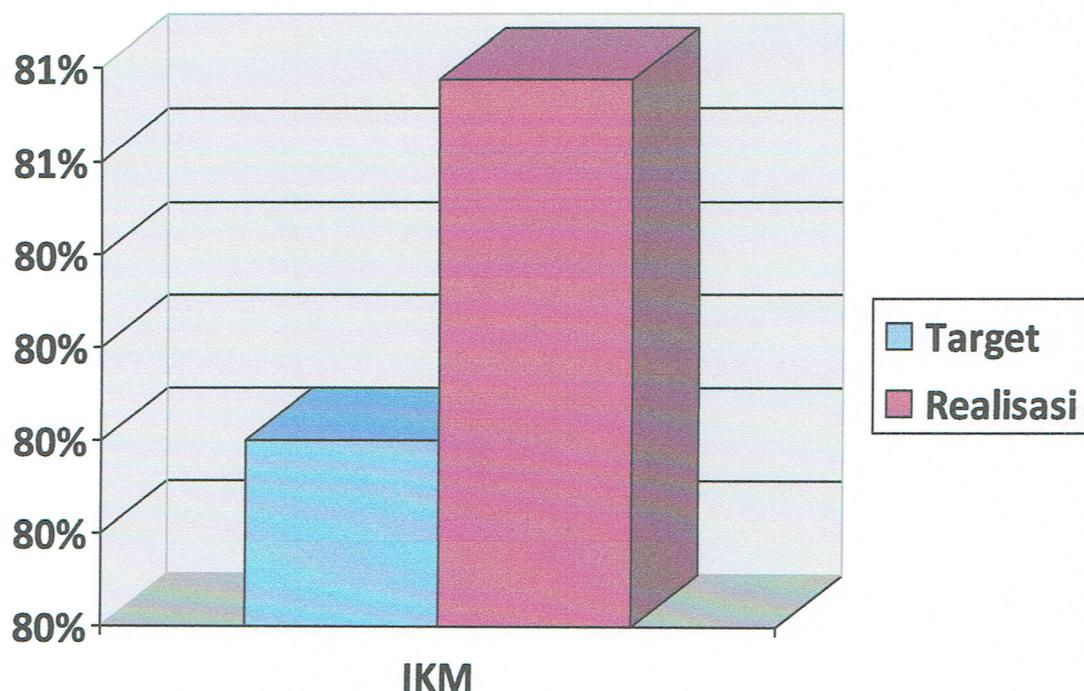
1. Tersedianya SOP untuk Setiap Jenis Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Ketersediaan aplikasi Sistem Pembayaran dan Pelaporan Online Pajak Daerah
3. Tersedianya Fasilitas Kotak Saran, Tempat Ibadah, Ruang Menyusui
4. Telah Berjalannya Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai secara Online dengan Bank Persepsi
5. Tersedianya Layanan Informasi, Konsultasi dan Sosialisasi

#### Permasalahan dan Faktor Penghambat :

1. SOP belum Sepenuhnya memenuhi Kebutuhan Teknis Pelayanan
2. Keterbatasan Layanan Pembayaran Pajak di tiap-tiap Kedai Bank Persepsi di setiap Kecamatan
3. Ketersediaan Layanan Informasi, Konsultasi dan Sosialisasi belum digunakan secara Optimal oleh Wajib Pajak
4. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pajak Daerah

#### Solusi Pemecahan Masalah :

1. Melakukan Revisi terhadap SOP Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Adanya Penambahan Jumlah Loket di Kedai Bank Persepsi di tiap-tiap Kecamatan
3. Penyediaan Pusat Layanan Informasi, Konsultasi dan Sosialisasi yang mudah Di jumpai dan diketahui Oleh Wajib Pajak
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang, Kegiatan dalam upaya peningkatan PAD



### III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana, terutama dalam Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.429.485.114,56,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.142.885.752,00,- Alokasi dana tersebut untuk membiayai 6 (enam) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, penjelasan persasan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	1.996.752.500	1.772.140.600	88,75 %
2.	Terpenuhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.472.277.400	1.253.740.500	85,15%
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	367.677.100	285.093.600	77,54%

#### 1. Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah

Dari Target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.996.752.500 dapat Terealisasi Sebesar Rp. 1.772.140.600 atau sebesar 88,75%

#### 2. Terpenuhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dari Target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.472.277.400 dapat Terealisasi Sebesar Rp. 1.253.740.500 atau sebesar 85,15%

#### 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dari Target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 367.677.100 dapat Terealisasi Sebesar Rp. 285.093.600 atau sebesar 77,54%

## Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Nilai Efisiensi
1.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100,49%	88,75%	11,74%
2.	Terpenuhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	132,06%	86,77%	45,29%
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	121,88%	99,41%	22,47%

Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan seluruh Kegiatannya berprinsip pada azas Penganggaran secara Rasional, sedangkan dalam pembelanjaannya mengedepankan azas Efisiensi tanpa mengurangi kualitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Hal ini terlihat Pada Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target Pendapatan dan mengefisiensi belanja sebagaimana pada tabel di atas dimana pada Sasaran Pertama dari Capaian Kinerja sebesar 100,49% dapat diwujudkan dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar 88,75% sehingga Efisiensi Anggaran dapat dilaksanakan sebesar 11,74%. Kemudian Pada Sasaran Kedua dari Capaian Kinerja sebesar 132,06% dapat diwujudkan dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar 86,77% sehingga Efisiensi Anggaran dapat dilaksanakan sebesar 45,29%. Selanjutnya Pada Sasaran Ketiga dari Capaian Kinerja sebesar 121,88% dapat diwujudkan dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar 99,41% sehingga Efisiensi Anggaran dapat dilaksanakan sebesar 22,47%.

**LAMPIRAN**

**PEDOMAN PENGHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	TARGET KINERJA SASARAN						
						KONDISI KINERJA AWAL		2016 2017 2018 2019 2020 2021				
1	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capian Pendapatan Daerah	Untuk mengetahui apakah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan telah tercapai	Capaian Pendapatan X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Membangun aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional	Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah	Untuk mengetahui apakah target pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan telah tercapai	Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Penjelasan**

- Tugas Fungsi : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- 1. Perumusan kebijakan dibidang pendapatan daerah
  - 2. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum
  - 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**LAMPIRAN II**

**RINGKASAN PERHITUNGAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018**

NAMA REKENING	TARGET 2018	REALISASI 2018	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Hasil Pajak Daerah	29.114.774.978,30	41.344.635.977,45	142,01
Hasil Retribusi Daerah	3.865.463.675,81	4.719.562.588,00	122,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.657.595.771,00	1.651.113.295,00	99,61
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.041.196.633,00	64.208.189.968,95	89,13
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>106.679.031.058,11</b>	<b>111.923.501.829,40</b>	<b>104,92</b>
<b>DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	233.298.861.000,00	248.874.259.372,00	106,68
Dana Alokasi Umum	646.609.433.000,00	646.609.433.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	198.259.495.000,00	162.440.212.758,00	81,93
<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.078.167.789.000,00</b>	<b>1.057.923.905.130,00</b>	<b>98,12</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
Pendapatan Hibah	63.458.000.000,00	66.167.240.000,00	104,27
Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.590.016.127,91	95.692.141.388,10	131,83
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	140.433.302.000,00	140.433.275.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.021.110.000,00	18.410.871.000,00	83,61
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>298.502.428.127,91</b>	<b>320.703.527.388,10</b>	<b>107,44</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.483.349.248.186,02</b>	<b>1.490.550.934.347,50</b>	<b>100,49</b>

**Penjelasan**

a. Pendapatan Asli Daerah

Target : Rp. 106.679.031.058,11

Realisasi : Rp. 111.923.501.829,40

Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2018 maka capaian sebesar 104,89% melebihi target disebabkan pendapatan dari pajak daerah dengan target sebesar Rp.29.114.774.978,30 terealisasi sebesar Rp.41.344.635.977,45 atau sebesar 142,01%

b. Dana Perimbangan

Target : Rp. 1.078.167.789.000,00

Realisasi : Rp. 1.057.923.905.130,00

Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2018 maka capaian sebesar 98,12% disebabkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dengan target sebesar Rp.198.259.495.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.162.440.212.758,00. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yakni dari target Rp. 131.911.101.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.834.909.186,00 atau kurang dari target sebesar Rp.31.076.191.814,00 dikarenakan sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik s/d Tahun 2017 yang masih terdapat dalam kas daerah. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non

Fisik Tahun 2018 memperhitungkan sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun-tahun sebelumnya di kas daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target : Rp. 298.502.428.127,91

Realisasi : Rp. 320.703.527.388,10

Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2018 maka capaian sebesar 107,44% disebabkan penerimaan dari pendapatan hibah dengan target Rp. 63.458.000.000 terealisasi sebesar Rp.66.167.240.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dengan target Rp.72.590.016.127,91 terealisasi sebesar Rp.95.692.141.388,10

### LAMPIRAN III

#### RINGKASAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018

SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2017
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.483.349.248.186,02</b>	<b>1.490.550.934.347,50</b>	<b>100,49</b>	<b>1.468.670.557.404,36</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>106.679.031.058,11</b>	<b>111.923.501.829,40</b>	<b>104,92</b>	<b>159.665.857.817,46</b>
Hasil Pajak Daerah	29.114.774.978,30	41.344.635.977,45	142,01	31.137.130.885,08
Hasil Retribusi Daerah	3.865.463.675,81	4.719.562.588,00	122,10	4.573.794.961,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.657.595.771,00	1.651.113.295,00	99,61	1.657.595.771,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.041.196.633,00	64.208.189.968,95	89,13	122.297.336.199,88
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.078.167.789.000,00</b>	<b>1.057.923.905.130,00</b>	<b>98,12</b>	<b>1.052.046.321.546,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	233.298.861.000,00	248.874.259.372,00	106,68	223.042.223.625,00
Dana Alokasi Umum	646.609.433.000,00	646.609.433.000,00	100,00	630.242.304.000,00
Dana Alokasi Khusus	198.259.495.000,00	162.440.212.758,00	81,93	198.761.793.921,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>298.502.428.127,91</b>	<b>320.703.527.388,10</b>	<b>107,44</b>	<b>256.958.378.040,90</b>
Pendapatan Hibah	63.458.000.000,00	66.167.240.000,00	104,27	934.000.000,00
Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.590.016.127,91	95.692.141.388,10	131,83	84.683.277.188,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	140.433.302.000,00	140.433.275.000,00	100,00	138.490.141.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.021.110.000,00	18.410.871.000,00	83,61	32.850.959.852,90

#### Penjelasan

1. Capaian Realisasi tahun 2018 melebihi Target tahun 2018 yaitu sebesar 100,49%. Realisasi ini lebih tinggi 1,4% dari capaian tahun 2017
2. Realisasi PAD tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2017 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatatkan di PAD, khususnya kode rekening Lain-lain PAD yang Sah. Sementara pada tahun 2018, sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, Hibah BOS dicatatkan pada kode rekening Pendapatan Hibah.

**LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN  
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KEADAAN PER 31 DESEMBER 2018**

SOPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah DPA (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi			SISA (Rp.)	DPA (Rp.)	Tender (Rp.)	Ket.
				Spj (FISIK) (Rp.)	(%)	Keuangan (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.687.723.123,00	356.629.000,00	2.356.209.411,00	87,67	2.378.768.189,00	88,50	293.030.611,00	15.924.323,00	-
1.1.	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	-	11.800.000,00	78,67	11.818.629,00	78,79	3.181.371,00	-	-
	- Belanja Perangko, Materal dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	11.800.000,00	11.818.629,00	78,79	11.818.629,00	78,79	3.181.371,00	-	-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.319.320,00	-	236.029.894,00	61,90	238.651.250,00	62,59	142.668.070,00	-	-
2.1.	- Belanja Telepon	14.400.000,00	-	11.516.282,00	79,97	11.700.000,00	81,25	2.700.000,00	-	-
	- Belanja Air	13.200.000,00	9.084.480,00	68,82	9.100.000,00	68,94	4.100.000,00	-	-	-
	- Belanja Listrik	280.519.320,00	151.864.564,00	54,14	154.000.000,00	54,90	126.519.320,00	-	-	-
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.200.000,00	63.564.558,00	86,84	63.851.250,00	87,23	9.348.750,00	-	-	-
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	62.750.000,00	-	48.627.370,00	77,49	62.750.000,00	100,00	-	-	-
3.1.	- Belanja Jasa Service	36.000.000,00	30.083.588,00	83,57	36.000.000,00	100,00	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan	26.750.000,00	18.543.782,00	69,32	26.750.000,00	100,00	-	-	-	-
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.329.600,00	-	20.105.600,00	98,90	20.105.600,00	98,90	224.000,00	224.000,00	-
	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.329.600,00	20.105.600,00	98,90	20.105.600,00	98,90	224.000,00	224.000,00	-	-
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	225.300.000,00	-	225.300.000,00	100,00	225.300.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.300.000,00	225.300.000,00	100,00	225.300.000,00	100,00	-	-	-	-
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	199.870.298,00	198.536.500,00	99,33	198.536.500,00	99,33	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	197.670.298,00	196.336.500,00	100,00	196.336.500,00	100,00	196.336.500,00	99,33	-	-
	- Belanja Dokumen / Administrasi Tender	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	-	-
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	184.883.025,00	158.092.500,00	169.666.500,00	91,77	170.292.500,00	92,11	14.590.525,00	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	-	-	-
	- Belanja Dokumen / Administrasi Tender	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	-	-	-
	- Belanja Cetak	172.683.025,00	158.092.500,00	158.092.500,00	100,00	158.092.500,00	91,55	14.590.525,00	-	-
	- Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.374.000,00	93,74	10.000.000,00	100,00	-	-	-	-

Hal : 1

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah DPA (Rp)	Kontrak (Rp.)	Spj (FISIK)		Realisasi Ketuangans (Rp.)	(%)	DPA (Rp.)	Tender (Rp.)	SISA Ket.
				5	6					
1	2	3	4							
1	8. Kantor	58.273.200,00	-	58.273.200,00	100,00	58.273.200,00	100,00	58.273.200,00	100,00	-
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering)									
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	40.566.880,00	-	28.586.376,00	70,47	28.901.376,00	71,24	11.665.504,00		
	- Belanja Surat Kabar / Majalah	40.566.880,00		28.586.376,00	70,47	28.901.376,00	71,24	11.665.504,00		
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	116.175.000,00	-	74.550.000,00	64,17	74.550.000,00	64,17	41.625.000,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.175.000,00		74.550.000,00	64,17	74.550.000,00	64,17	41.625.000,00		
	11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	536.310.000,00	-	536.052.060,00	99,95	536.310.000,00	100,00	-		
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	536.310.000,00		536.052.060,00	99,95	536.310.000,00	100,00	-		
	12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	475.170.800,00	-	426.570.800,00	89,77	426.570.800,00	89,77	48.600.000,00		
	- Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	24.000.000,00		24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	-		
	- Belanja Alat Tulis Kantor	570.800,00		570.800,00	100,00	570.800,00	100,00	-		
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	450.600.000,00		402.000.000,00	89,21	402.000.000,00	89,21	48.600.000,00		
	13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	156.775.000,00	-	143.200.000,00	91,34	145.575.000,00	92,86	11.200.000,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.775.000,00		143.200.000,00	91,34	145.575.000,00	92,86	11.200.000,00		
	14. Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor	215.000.000,00	-	178.911.111,00	100,00	181.133.334,00	84,25	33.866.666,00		
	- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	215.000.000,00		178.911.111,00	100,00	181.133.334,00	84,25	33.866.666,00		
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	571.221.529,00	220.567.700,00	478.699.755,00	83,51	494.669.850,00	86,30	74.643.300,00	74.643.300,00	3.908.379,00
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	95.000.000,00	92.570.000,00	92.570.000,00	100,00	92.570.000,00	100,00	2.430.000,00	-	2.430.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	60.000.000,00	58.935.000,00	58.935.000,00	100,00	58.935.000,00	100,00	1.065.000,00	-	1.065.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Bendera/ Umbul-umbul	35.000.000,00	33.635.000,00	33.635.000,00	100,00	33.635.000,00	100,00	1.365.000,00	-	1.365.000,00

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah DPA (Rp)	Kontrak (Rp.)	Realisasi			SISA		Tender (Rp.)	Ket.
				Spj (FTSIK) (Rp.)	( % )	Keuangan (Rp.)	( % )	DPA (Rp.)		
								8		
1	2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	45.199.000,00	44.735.700,00	44.735.700,00	100,00	44.735.700,00	100,00	463.300,00	-	-
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	17.199.000,00	17.092.000,00	17.092.000,00	100,00	17.092.000,00	100,00	107.000,00	-	-
	- Belanja Modal Pengadaan Printer	28.000.000,00	27.643.700,00	27.643.700,00	100,00	27.643.700,00	100,00	356.300,00	-	-
3.	3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	84.740.379,00	83.262.000,00	83.262.000,00	100,00	83.262.000,00	98,26	-	1.478.379,00	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	100,00	-	-
	- Belanja Dokumen/Administrasi Tender	200.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	100,00	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Kontruksi	83.540.379,00	82.062.000,00	82.062.000,00	100,00	82.062.000,00	100,00	100,00	-	1.478.379,00
4.	4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	256.251.000,00	-	166.100.905,00	64,82	182.071.000,00	71,05	74.180.000,00	-	-
	- Belanja Penggantian Suku Cadang	100.071.000,00	88.870.548,00	88,81	88.870.548,00	100.071.000,00	100,00	100,00	-	-
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	156.180.000,00	77.230.357,00	49,45	77.230.357,00	82.000.000,00	52,50	74.180.000,00	-	-
5.	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	92.031.150,00	-	92.031.150,00	100,00	92.031.150,00	100,00	100,00	-	-
	- Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	92.031.150,00	92.031.150,00	92.031.150,00	100,00	92.031.150,00	100,00	100,00	-	-
3.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	390.134.000,00	-	390.118.200,00	100,00	390.134.000,00	100,00	100,00	-	-
1.	1. Blimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	390.134.000,00	-	390.118.200,00	100,00	390.134.000,00	100,00	100,00	-	-
	- Belanja Kursus-kursus Singkat/Perlatihan	390.134.000,00	-	390.118.200,00	100,00	390.134.000,00	100,00	100,00	-	-
4.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.534.200,00	-	-	-	-	-	15.534.200,00	-	-
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	15.534.200,00	-	-	-	-	-	15.534.200,00	-	-
	- Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	-	-	-	-	-	12.100.000,00	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	2.234.200,00	-	-	-	-	-	2.234.200,00	-	-
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	1.200.000,00	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	-

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah DPA (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi			SISA	Tender (Rp.)	Ket.	
				Spj (FISIK) (Rp.)	(%)	Keuangan (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan 1. Daerah	2.476.272.900,00	49.505.500,00	2.107.950.033,00	85,13	2.167.277.500,00	87,52	258.500.900,00	50.494.500,00	-
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.534.000,00	-	82.534.000,00	100,00	82.534.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	-	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Cetak	2.184.000,00	-	2.184.000,00	100,00	2.184.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.500.000,00	-	41.500.000,00	100,00	41.500.000,00	100,00	-	-	-
	2. Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan	29.250.000,00	-	29.250.000,00	100,00	29.250.000,00	100,00	-	-	-
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.843.300,00	-	109.647.300,00	98,04	110.043.300,00	98,39	1.800.000,00	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	-	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.800,00	-	5.500.800,00	100,00	5.500.800,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.412.500,00	-	45.412.500,00	100,00	45.412.500,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.950.000,00	-	20.700.000,00	98,81	20.950.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	8.780.000,00	-	8.634.000,00	98,34	8.780.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	21.600.000,00	-	19.800.000,00	91,67	19.800.000,00	91,67	1.800.000,00	-	-
3	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	225.520.800,00	-	219.445.800,00	97,31	219.445.800,00	97,31	6.075.000,00	-	-
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	-	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	-	-	-
	- Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	69.000.000,00	-	69.000.000,00	100,00	69.000.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.800,00	-	1.940.800,00	100,00	1.940.800,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Cetak	200.000,00	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.880.000,00	-	47.880.000,00	100,00	47.880.000,00	100,00	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.700.000,00	-	17.625.000,00	99,58	17.625.000,00	99,58	75.000,00	-	-
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	79.200.000,00	-	73.200.000,00	92,42	73.200.000,00	92,42	6.000.000,00	-	-

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah DPA (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Realisasi			SISA (Rp.)	Tender (Rp.)	Ket.
				Spj (FISIK)	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	(%)	7	8	9
									11
4.	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	159.874.000,00	-	158.935.000,00	99,41	158.935.000,00	99,41	939.000,00	-
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	-
	- Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	100,00	6.631.100,00	100,00	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	6.631.100,00	6.631.100,00	100,00	6.631.100,00	100,00	6.631.100,00	100,00	-
	- Belanja Cetak	27.355.100,00	27.355.100,00	100,00	27.355.100,00	100,00	27.355.100,00	100,00	-
	- Belanja Penggandaan	307.800,00	193.800,00	62,96	193.800,00	62,96	193.800,00	62,96	114.000,00
	- Belanja Dokumentasi	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00	100,00	-
	- Belanja Makaman dan Minuman Rapat	28.175.000,00	28.175.000,00	100,00	28.175.000,00	100,00	28.175.000,00	100,00	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.700.000,00	17.875.000,00	95,59	17.875.000,00	95,59	17.875.000,00	95,59	825.000,00
	- Belanja Sosialisasi	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00	36.750.000,00	100,00	36.750.000,00	100,00	-
	- Transportasi Instruktur	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	100,00	-
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	9.300.000,00	100,00	9.300.000,00	100,00	-
	- Belanja Jasa Instruktur	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	100,00	-
5.	Pengelolaan Pungutan Pajak & Retribusi Daerah Kab. Inhu	595.878.500,00	-	509.838.500,00	84,07	509.838.500,00	85,56	86.040.000,00	-
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	7.896.000,00	7.896.000,00	100,00	7.896.000,00	100,00	7.896.000,00	100,00	-
	- Belanja Cetak	28.537.500,00	28.537.500,00	100,00	28.537.500,00	100,00	28.537.500,00	100,00	-
	- Belanja Makaman dan Minuman Rapat	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00	38.500.000,00	100,00	38.500.000,00	100,00	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.650.000,00	143.650.000,00	100,00	143.650.000,00	100,00	143.650.000,00	100,00	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.555.000,00	76.428.000,00	99,83	76.555.000,00	100,00	76.555.000,00	100,00	-
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	291.140.000,00	196.342.500,00	67,44	196.342.500,00	67,44	205.100.000,00	70,45	86.040.000,00
6.	Akurasi Pendataan & Pedataaran WP WR	261.726.400,00	-	233.183.780,00	89,09	240.640.500,00	91,94	241.065.900,00	-
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	11.400.000,00	100,00	11.400.000,00	100,00	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	11.660.900,00	100,00	11.660.900,00	100,00	1.000.000,00	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	11.660.900,00	9.281.400,00	52,41	9.281.400,00	52,41	9.435.000,00	53,28	8.273.400,00
	- Belanja Cetak	17.708.400,00	7.169.600,00	100,00	7.169.600,00	100,00	7.169.600,00	100,00	-
	- Belanja Penggandaan	7.169.600,00	31.500.000,00	72,73	31.500.000,00	72,73	31.500.000,00	72,73	11.812.500,00
	- Belanja Makaman dan Minuman Rapat	43.312.500,00	94.800.000,00	99,48	94.800.000,00	99,48	95.300.000,00	100,00	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.300.000,00	67.371.880,00	90,83	67.371.880,00	90,83	74.175.000,00	100,00	-

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah DPA (Rp)	Kontrak (Rp.)	Realisasi		SISA	Ket.				
				Spj (FISIK) (Rp.)	(%)	Ketuangans (Rp.)	(%)	DPA (Rp.)	Tender (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	298.954.300,00	-	274.366.753,00	91,78	298.954.300,00	100,00				
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00		9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00				
	- Belanja Alat Tulis Kantor	6.454.300,00		6.454.300,00	100,00	6.454.300,00	100,00				
	- Belanja Penggandaan	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00				
	- Belanja Makaran dan Minuman Rapat	14.490.000,00		14.490.000,00	100,00	14.490.000,00	100,00				
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	266.410.000,00		241.822.453,00	90,77	266.410.000,00	100,00				
8.	Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	348.201.100,00	-	277.712.400,00	79,76	293.935.100,00	84,42	54.266.000,00			
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00		7.800.000,00	100,00	7.800.000,00	100,00				
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		-	-	-	-	1.000.000,00			
	- Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	5.800.000,00		-	-	-	-	5.800.000,00			
	- Belanja Alat Tulis Kantor	37.119.100,00		37.119.100,00	100,00	37.119.100,00	100,00				
	- Belanja Dokumen / Administrasi Tender	100.000,00		-	-	-	-	100.000,00			
	- Belanja Cetak	68.671.300,00		48.631.300,00	70,82	48.631.300,00	70,82				
	- Belanja Makaran dan Minuman Rapat	88.200.000,00		60.874.000,00	69,02	60.874.000,00	69,02				
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.985.700,00		71.900.000,00	99,88	71.985.700,00	100,00				
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.125.000,00		45.988.000,00	74,02	62.125.000,00	100,00				
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00	5.400.000,00	100,00				
	183.937.400,00	-		126.792.400,00	68,93	126.792.400,00	68,93	57.145.000,00			
9.	Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00		9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00				
	- Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	15.700.000,00		15.700.000,00	100,00	15.700.000,00	100,00				
	- Belanja Alat Tulis Kantor	9.352.400,00		9.352.400,00	100,00	9.352.400,00	100,00				
	- Belanja Makaran dan Minuman Rapat	9.450.000,00		9.450.000,00	100,00	9.450.000,00	100,00				
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.250.000,00		64,69	63.250.000,00	64,69	34.525.000,00				
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.440.000,00		46,22	19.440.000,00	46,22	22.620.000,00				

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah DPA (Rp)	Kontrak (Rp.)	Realisasi		SISA	Tender (Rp.)	Ket.
				Spj (FISIK) (Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah	207.803.100,00	49.505.500,00	124.378.600,00	59,85	126.158.600,00	60,71	31.150.000,00
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00		9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	100,00	
	- Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	31.400.000,00		16.400.000,00	52,23	16.400.000,00	52,23	
	- Belanja Alat Tulis Kantor	3.913.100,00		3.913.100,00	100,00	3.913.100,00	100,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00	10.500.000,00	100,00	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.950.000,00						
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.040.000,00		21.260.000,00	92,27	23.040.000,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00		49.505.500,00	100,00	49.505.500,00	100,00	
	- Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	14.400.000,00		13.200.000,00	91,67	13.200.000,00	91,67	
	JUMLAH	6.142.885.752,00	626.702.200,00	5.332.977.399,00	86,82	5.430.849.539,00	88,41	641.709.011,00
								70.327.202,00

### **III.4 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 31 kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 dilakukan pemantauan secara terus menerus, juga secara berkala minimal 1 (satu) kali diadakan rapat/pertemuan antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, dan Bendaharawan baik Bendaharawan Pengeluaran maupun Bendaharawan Penerima sehingga jika dalam pelaksanaan kegiatan ditemui hambatan/masalah dapat segera diatasi.

## BAB IV

### P E N U T U P

Secara umum kegiatan, program dan arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Namun analisa atas capaian masing-masing sasaran sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 belum seluruhnya dapat dicapai.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di masa yang akan datang akan ditempuh upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan masalah pokok yang semakin selektif sehingga setiap kegiatan terkait sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Meningkatkan pengawasan atasan langsung (*top down*) agar rencana kegiatan yang dibuat dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. Lebih mengoptimalkan pemantapan sarana dan prasarana yang tersedia.

Terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini akan dijadikan masukan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang lebih baik di tahun 2020.

Rengat, 01 Februari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRA GIRI HULU



H. ARIEF FADILLAH, SE, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650713 199402 1 001